

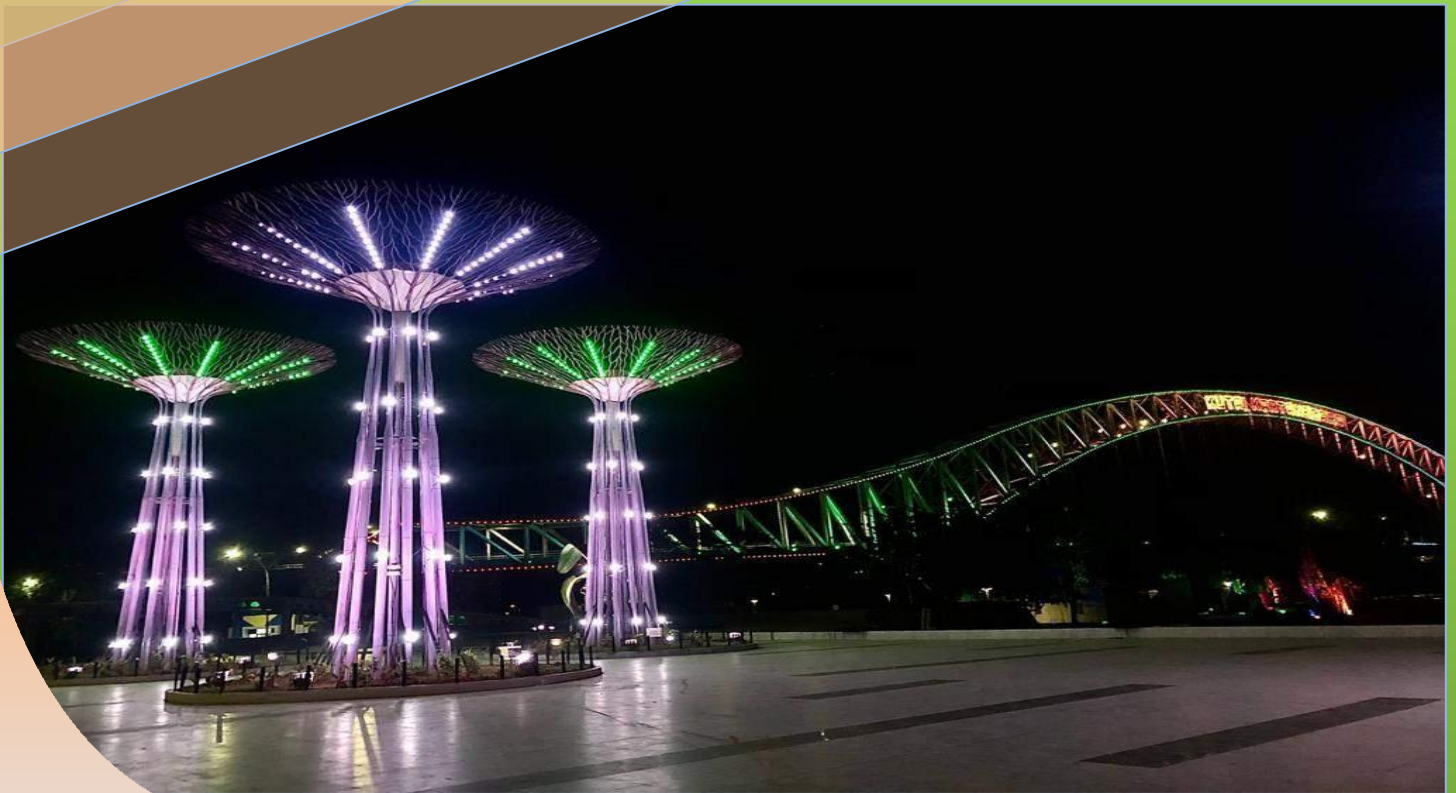
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DINAS KETAHANAN PANGAN

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024



**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI GEDUNG D LANTAI 2**

JALAN WOLTER MONGINSIDI TENGGARONG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTIKNO, SP.,MM

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- 3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
- 4 Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
- 5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
- 6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

- 7 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 8 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 9 Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
- 10 Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- 11 Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
- 12 Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
- 13 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 14 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 15 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
- 16 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 17 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 18 Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
- 19 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 20 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

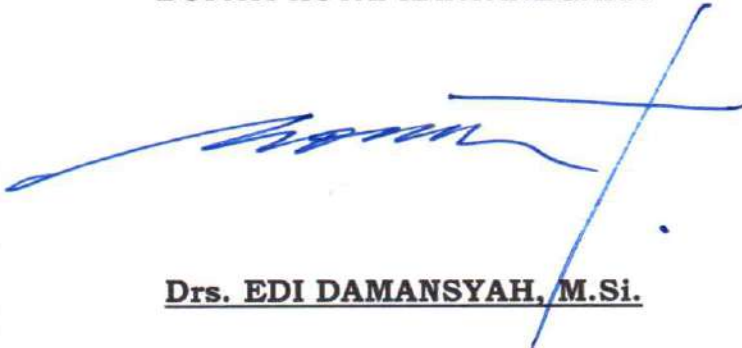
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.



SUTIKNO, SP.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196505051987091009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/hari	2,387
		Ketersediaan Protein	Gram/kapita/hari	80,20
3	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skore PPH) Konsumsi.	Skor	86
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
5	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100

7	Terlaksananya Ketaatan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
8	Terlaksananya Ketaatan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
9	Terlaksananya Ketaatan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100

12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
14	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
17	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100

18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
19	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
22	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
24	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
25	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
26	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
27	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100

28	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
29	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
30	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
31	Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Rupiah	7,3 T
32	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
33	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
34	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
35	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
37	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
39	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau

40	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
41	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
42	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
43	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

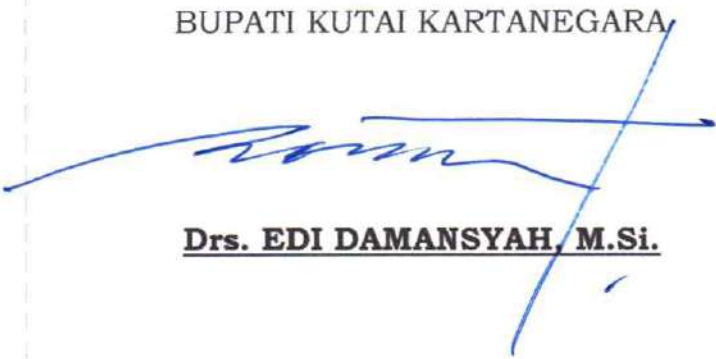
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

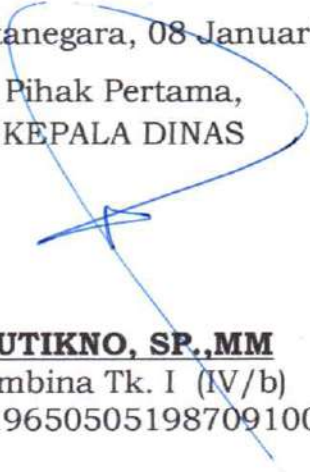
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.000.000.000	APBD
2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	300.000.000	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	6.250.000.000	APBD
4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.600.000.000	APBD
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.771.410.373	APBD
JUMLAH ANGGARAN		22.921.410.373	

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.


SUTIKNO, SP.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196505051987091009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANANIAS, S.Hut., MP.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUTIKNO, SP., MM.

Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;

6. Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil kepuasan masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

SUTIKNO, SP., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196505051987091003

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS

ANANIAS, S.Hut., MP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198101152005021003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,00
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100

7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I Paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober tiap tahun	Persen	100
12	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100

13	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Adeministrasi dan Kerugian BPK atas Audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100
14	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
15	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
16	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja perangkat daerah (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
17	Terlaksananya Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100
18	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
19	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
20	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100

21	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
22	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
23	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
24	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	100
25	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Fakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia Sesuai dengan jumlah Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksanaan pada Perangkat Daerah	Persen	100
26	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per Tanggal 25 Setiap bulan	Persen	100
27	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
28	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
29	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
30	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
31	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95

32	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
33	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
34	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
35	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
36	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	450.000.000,00	APBD
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.023.803.965,00	APBD
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	40.000.000,00	APBD
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	150.000.000,00	APBD
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	725.000.000,00	APBD
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	574.926.408,00	APBD
7	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH	170.000.000,00	APBD
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	637.680.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		10.771.410.373,00	

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

SUTIKNO, SP., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196505051987091003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS

ANANIAS, S.Hut., MP.

Pembina (IV/a)
NIP. 198101152005021003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. AMIR HADY
Jabatan : KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN
PANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUTIKNO, SP., MM.
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;

6. Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil kepuasan masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

SUTIKNO, SP. MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196505051987091003

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN

IR. AMIR HADY
Penata TK. I (III/d)
NIP. 196606211993031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,00
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Ketersediaan energi	Kkal/Kapita/Hari	2.387
		Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	80,20
3	Meningkatnya Score Pola Panganharapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	Skor	86
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Februari setiap tahun	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

8	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
9	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja perangkat daerah (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
10	Terlaksananya Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100
11	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
12.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
13	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
14	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
15	Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan Pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah	1
16	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevelensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
17	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender	Persen	100

18	Pengendalian Inflasi	Angka Inflansi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
19	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per Tanggal 25 Setiap bulan	Persen	100
20	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/ Vape adalah area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
1	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	475.000.000,00	APBD
2	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN	1.700.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		2.175.000.000,00	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

SUTIKNO, SP., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196505051987091003

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG DISTRIBUSI
DAN CADANGAN PANGAN

Ir. H. AMIR HADY
Penata TK. I (III/d)
NIP. 196606211993031006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. EVI VIOLINDHA, SE., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUTIKNO, SP., MM.
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;

6. Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil kepuasan masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

SUTIKNO, SP., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196505051987091003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN
DAN KERAJANAN PANGAN

Hj. EVI VIOLINDHA, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197301121998032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,00
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Ketersediaan energi	Kkal/Kapita/Hari	2.387
		Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	80,20
3	Meningkatnya Score Pola Pangan Harapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	Skor	86
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100

8	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja perangkat daerah (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
9	Terlaksananya Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100
10	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
12	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
13	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
14	Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah	1
15	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevelensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
16	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender	Persen	100

17	Pengendalian Inflansi	Angka Inflansi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
18	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/ Vape adalah area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		
1	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.250.000.000,00	APBD
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
2	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	100.000.000,00	APBD
3	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	1.900.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		8.250.000.000,00	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

SUTIKNO, SP., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196505051987091003

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN
DAN KERAWANAN PANGAN

Hj. EVI VIOLINDHA, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197301121998032006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AJI DENI HM., SP., M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUTIKNO, SP., MM.

Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;

6. Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil kepuasan masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

SUTIKNO, SP., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196505051987091003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN
DAN KERAJANAN PANGAN

Hj. EVI VIOLINDHA, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197301121998032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,00
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Ketersediaan energi	Kkal/Kapita/Hari	2.387
		Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	80,20
3	Meningkatnya Score Pola Pangan Harapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	Skor	86
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100

8	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja perangkat daerah (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
9	Terlaksananya Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100
10	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
12	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
13	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
14	Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah	1
15	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevelensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
16	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender	Persen	100

17	Pengendalian Inflansi	Angka Inflansi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
18	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/ Vape adalah area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
1	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		300.000.000,00	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

SUTIKNO, SP., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196505051987091003

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KEAMANAN
PANGAN

AJI DENI HM., SP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197006202001122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HETTY SRI TUESTIANY, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN
PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUTIKNO, SP., MM.
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;

6. Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil kepuasan masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

SUTIKNO, SP., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196505051987091003

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN
PENGANEKARAGAMAN PANGAN

HETTY SRI TUESTIANY, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197403052001122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,00
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Ketersediaan energi	Kkal/Kapita/Hari	2.387
		Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	80,20
3	Meningkatnya Score Pola Panganharapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	Skor	86
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau	Tingkat ketepatan waktu input E-Pantau dan telah diVerifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100

8	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
9	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Persen	100
10	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
12	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
13	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
14	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
15	Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan Pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah	1
16	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevelensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
17	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender	Persen	100

18	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi Maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
19	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per Tanggal 25 Setiap bulan	Persen	100
20	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/ Vape adalah area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
21	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

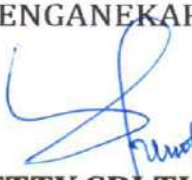
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
1	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	1.425.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		1.425.000.000,00	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

SUTIKNO, SP., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196505051987091003

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN
PENGANEKARAGAMAN PANGAN


HETTY SRI TUESTIANY, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197403052001122002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRA. SUTARTI
Jabatan : PERENCANA (SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN KEUANGAN).

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANANIAS, S.Hut., MP.
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya
disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;

6. Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil kepuasan masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

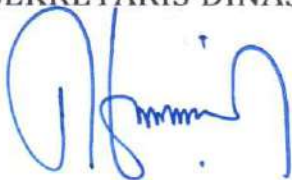
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS



ANANIAS, S.Hut., MP.

Pembina (IV/a)

NIP. 198101152005021003

Pihak Pertama,
PERENCANA (SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEUANGAN



DRA. SUTARTI

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19700521 199402 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,00
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
6	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100

7	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
9	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas Audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
11	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja perangkat daerah (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
12	Terlaksananya Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100
13	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
14	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100

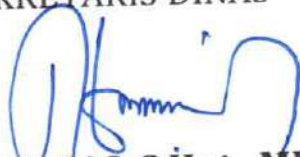
15	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
16	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	100
17	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per Tanggal 25 Setiap bulan	Persen	100
18	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	450.000.000,00	APBD
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.023.803.965,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		8.473.803.965,00	

Kutai Kartanegara, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS



ANANIAS. S. Hut., MP.

Pembina (IV/a)
NIP. 198101152005021003

PERENCANA (SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEUANGAN



DRA. SUTARTI

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700521 199402 2 002